

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu tujuan dari negara Indonesia seperti yang sudah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi dalam penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa prinsip otonomi dan kewenangan seluas-luasnya diberikan kepada pemerintah daerah pada akhirnya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat salah satunya melalui presentase penduduk miskin, semakin sedikit jumlah penduduk miskin yang ada maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut sejahtera. Terdapat beberapa faktor yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin suatu daerah, salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP).

Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan positif kemungkinan besar dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, karena

pertumbuhan ekonomi yang meningkat menandakan bahwa daerah tersebut memiliki pendapatan yang meningkat juga, sehingga masyarakat juga menikmati hasil dari peningkatan pendapatan tersebut. tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tidak terlepas juga dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Menurut (Wijayanti, 2015) pertumbuhan ekonomi tercermin dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendongkrak PAD. Kemampuan pengelolaan anggaran yang tepat menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang. Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan pertumbuhan tingkat kesejahteraan. Salah satu faktor dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat menandakan pemerintah berhasil melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Penelitian yang dilakukan Wijayanti (2015) memberikan hasil dimana pendapatan asli daerah (PAD) secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Selain peningkatan PAD, kinerja keuangan pemerintah juga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil yang sama juga ditunjukkan Utama

(2009) dan Berliani (2016) dimana kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007).

Walaupun telah diamanatkan dan tercantum dalam Undang-Undang, usaha pemerintah Indonesia untuk mensejahterahkan masyarakat belum maksimal. Hal ini ditunjukkan melalui fenomena mengenai kesenjangan antar daerah di Indonesia terutama masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia (www.setkab.go.id). Ketimpangan yang terjadi diukur menggunakan indeks rasio gini dimana pada tahun 2012-2017 memang terjadi penurunan dari 0.41 menjadi 0,391, tetapi tidak menandakan hal ini menjadi baik. Data tersebut diperkuat dengan data yang didapat dari Global Wealth Report yang diterbitkan oleh Credit Suisse's, dimana Indonesia menempati peringkat ke-4 negara paling timpang di dunia. Data yang berasal dari Global Wealth Report menyatakan 1% orang terkaya menguasai 49.3% persen kekayaan nasional. Hampir 50% kekayaan nasional dimiliki oleh 1% (2.620.000 jiwa) orang terkaya di Indonesia. Pemerintah sudah semestinya bekerja lebih baik untuk mengalokasikan pendapatan nasional dengan lebih baik, karena sebanyak 49,3% kekayaan nasional menjadi pendapatan untuk 1% orang terkaya di Indonesia, sedangkan 50,3% sisanya menjadi pendapatan bagi 99% (259.380.000 jiwa) masyarakat di Indonesia.

Permasalahan mengenai ketimpangan yang terjadi juga dapat dibuktikan melalui jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,

jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 memang menurun dari angka 10,86% menjadi 10,12%. Namun, selama tahun 2016-2017 tren yang terjadi adalah jumlah penduduk miskin setiap provinsi di Indonesia tidak menurun setiap tahun, melainkan terjadi fluktuasi untuk beberapa provinsi di Indonesia. Ini menandakan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengurangi kesenjangan dan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kinerja pemerintah daerah dapat dinilai melalui 4 jenis rasio, antara lain adalah rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi belanja, dan rasio belanja layanan publik atau belanja langsung. Rasio-rasio tersebut apabila memiliki hasil yang baik dalam penilaian kinerja pemerintah maka kemungkinan besar akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat Kesejahteraan masyarakat sendiri akan diukur melalui jumlah penduduk miskin menggunakan data dari Badan Pusat Statistik.

Peneliti termotivasi untuk meneliti kembali dengan menggabungkan beberapa variabel yang digunakan, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, analisis rasio keuangan daerah dan jumlah penduduk miskin sebagai indikator kesejahteraan. Peneliti akan menambah jumlah objek yang digunakan yaitu dengan menganalisis laporan keuangan daerah seluruh Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka peneliti akan menguji **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh secara langsung kinerja keuangan daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
2. Apakah terdapat pengaruh secara langsung kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah terdapat pengaruh secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
4. Apakah terdapat pengaruh secara tidak langsung kinerja keuangan daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian hanya dilakukan pada tingkat provinsi.
2. Indikator pengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Jumlah penduduk miskin merupakan indikator kesejahteraan masyarakat.

4. Penelitian hanya menggunakan laporan keuangan tingkat provinsi tahun 2015-2016.
5. Penelitian hanya menggunakan data menurut Badan Pusat Statistik mengenai IPM dan jumlah penduduk miskin tahun 2016-2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Menguji penelitian terdahulu dengan menambahkan obyek.
2. Membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.
3. Menguji penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel yang berbeda.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan beberapa kontribusi, diantaranya :

1. Kontribusi teori: memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh antara kinerja keuangan daerah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Kontribusi kebijakan: memberikan masukan bagi pemerintah dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data, hasil penelitian yang diperoleh, dan interpretasi pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.